

Artikel 1

Memperluas Jangkauan Pengawasan Pemilu melalui Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Ketapang

BAWASLU: Pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab jajaran pengawas. Di tengah luasnya wilayah Kabupaten Ketapang dan beragamnya karakteristik masyarakat, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menerima laporan dari masyarakat. Namun, pengawasan yang efektif tidak cukup hanya dilakukan dengan mengandalkan jajaran pengawas yang berada di lapangan. Masyarakat yang berada langsung di lingkungan tempat tinggalnya juga memiliki posisi strategis untuk mengetahui berbagai persoalan yang mungkin muncul.

Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperluas jangkauan pengawasan hingga ke lingkungan masyarakat. Informasi mengenai dugaan pelanggaran tidak selalu muncul di ruang publik atau langsung sampai kepada pengawas. Karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang termasuk pelanggaran, bagaimana cara mencegahnya, serta ke mana harus menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi perlu dibangun sebagai sebuah ekosistem. Masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan kelompok komunitas dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya dalam mengawal proses demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Salah satunya melalui edukasi kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah. Kegiatan tersebut diarahkan agar generasi muda memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih sekaligus mengetahui berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang perlu dihindari dan diawasi.

Penguatan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Keterlibatan kelompok tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pengawasan pemilu sekaligus membangun kesadaran demokrasi di lingkungan masyarakat. Bawaslu Ketapang juga telah membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif.

Dari Sosialisasi Menjadi Gerakan

Ke depan, pengawasan partisipatif perlu diarahkan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Masyarakat yang telah memperoleh edukasi dapat didorong untuk menjadi bagian dari jejaring pengawasan di lingkungannya masing-masing.

Caranya dapat dilakukan secara sederhana. Misalnya, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri dugaan pelanggaran, cara mendokumentasikan informasi secara tepat, serta mekanisme menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Dengan demikian, masyarakat tidak mengambil alih tugas pengawas, tetapi menjadi mata dan telinga demokrasi yang membantu menyampaikan informasi kepada lembaga yang berwenang.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendukung pola tersebut. Informasi mengenai mekanisme pelaporan, edukasi kepemiluan, serta pencegahan pelanggaran dapat disampaikan melalui media sosial dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bawaslu Ketapang sendiri telah mengembangkan materi edukasi digital untuk membantu masyarakat memahami alur layanan, termasuk penerimaan laporan dugaan pelanggaran.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pengawasan pemilu tidak hanya berlangsung ketika tahapan sedang berjalan. Penguatan pemahaman masyarakat dapat dilakukan sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai sehingga ketika tahapan berlangsung, masyarakat telah mengetahui peran yang dapat mereka lakukan.

Membangun Pengawasan dari Lingkungan Terdekat

Pengawasan partisipatif pada akhirnya dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa, kelurahan, sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga lingkungan keluarga dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran demokrasi.

Masyarakat tidak harus menjadi ahli hukum pemilu untuk dapat berpartisipasi. Hal yang paling penting adalah mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami batasan dalam pemilu, tidak mudah menerima atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia.

Dengan pola tersebut, pengawasan pemilu tidak hanya dipandang sebagai tugas lembaga pengawas, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi.

Kabupaten Ketapang membutuhkan pengawasan yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Karena itu, membangun jejaring pengawasan partisipatif dari tingkat masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pencegahan dan menciptakan pemilu yang lebih transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan bukan hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mencegah agar pelanggaran tidak terjadi.

Pengawasan yang kuat tidak hanya hadir di ruang pemungutan suara, tetapi tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk menjaga demokrasi.

Penulis : Dede Hadhori

Editor : Medya Fahrurrazi